

## **Strategi Lainnya dalam Mengurangi Kejahatan Korupsi**

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa tahun terakhir selalu ditingkatkan. Demikian pula pengawasan masyarakat, baik melalui media massa maupun lembaga anti korupsi, tidak pernah berhenti. Akan tetapi pada kenyataannya, korupsi semakin berkembang, kelincahan gerannya melebihi para petugas pemberantas korupsi.

Kita lihat saja, korupsi ternyata tidak saja berada di wilayah yang jauh dari pengawasan dan pihak-pihak yang anti terhadapnya, melainkan di sekeliling mereka itu dan bahkan juga terjadi pada bagian pemberantas korupsi itu sendiri. Kasus Nazaruddin dan juga lainnya yang terlibat dengannya, selama ini adalah sebagai orang yang ikut menyerukan gerakan pemberantasan korupsi. Bahkan, mereka juga mendeklarasikan diri sebagai pihak yang anti atau pembenci tindakan korupsi.

Berperang melawan musuh dari dalam sendiri, tentu tidak mudah. Apalagi kekuatan itu sudah sedemikianh kokoh, tali temali berkelindan antara yang memusuhi dan yang dimusuhi. Di antara mereka sudah saling membangun kerjasama yang sedemikian kokoh, agar saling mendapatkan keuntungan, baik secara bersama-sama maupun untuk kepentingan dirinya sendiri.

Semula orang tidak percaya kepada kapabilitas kepolisian, kejaksaan, juga kehakiman, dalam memberantas korupsi yang semakin marak. Sebagai jalan keluar, maka diambil kebijakan berupa membentuk sebuah komisi yang khusus bertugas memberantas kejahatan itu. Akan tetapi lagi-lagi, lembaga baru tersebut menemukan batu sandungan, yaitu oknum pimpinannya sendiri terbukti melakukan penyimpangan, hingga akhirnya ia dipenjarakan.

Keadaan itu akhirnya benar-benar menjadi rumit, karena para pejabat yang melakukan tindakan korupsi tersebut ternyata merata, baik dari oknum polisi, kejaksaan, kehakiman, dan bahkan juga oknum KPK sendiri. Persoalan itu akhirnya menjadi tidak sederhana. Para ahli di bidangnya, peneliti, dan juga pakar lainnya tidak jarang dihadirkan untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, tetapi ternyata belum mendapatkan hasil yang meyakinkan.

Dalam suatu kesempatan berdiskusi, saya bertemu dengan salah seorang pimpinan lembaga yang rawan terjadi korupsi, yaitu di instansi perpajakan. Tatkala sedang berdiskusi mencari jalan keluar terhadap problem tersebut, ia secara terus terang mengatakkan bahwa tidak pernah ada buku, literatur dan hasil penelitian yang isinya dianggap strategis untuk dijadikan petunjuk dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, atau orang yang tidak beriman.

Orang yang tidak beriman, menurut pimpinan dinas perpajakan tersebut, adalah orang yang tidak mau percaya dan sekaligus juga tidak bisa dipercaya. Orang seperti itu sekalipun cerdas dan penampilannya meyakinkan, jika dipercaya akan khianat. Diawasi seperti apapun, manakala ada kesempatan, mereka akan menyimpang. Sebab mereka tidak merasa takut dengan siapapun, kecuali terhadap hukuman, yang menurut keyakinannya di dunia ini bisa diatur-aturl.

Atas dasar pandangan itu, dia membagi stafnya ke dalam dua kategori, yaitu yang dianggap memiliki keimanan yang kuat, yang ia sebut sebagai kelompok pondamentalis. Sebutan itu diberikan kepada stafnya yang memiliki keyakinan keagamaan kuat. Sedangkan staf lainnya adalah disebut kelompok boys. Kategori kedua ini,-----kelompok boys, dilihat dari kehidupan keagamaannya kurang kuat, namun penampilannya tampak modis dan atau selalu tampak *keren*.

Masih menurut pimpinan dinas perpajakan tersebut, bahwa staf yang disebut boys manakala disertai kepercayaan yang terkait dengan keuangan, sekalipun mereka diawasi dan atau dikontrol dengan cara apapun, jika ada kesempatan, mereka akan melakukan penyimpangan. Staf seperti itu cocok ditugasi menghadiri pesta, atau kegiatan yang bersifat serimonial. Sebaliknya, mereka yang berpenampilan taliban, tidak akan cocok untuk kegiatan pesta, ----- dan mungkin juga tidak mau, namun kelebihanannya, sekalipun kerjanya tidak diawasi, akan sanggup menunaikan amanah, artinya bisa dipercaya.

Gambaran tersebut itulah yang dipandang sebagai “cara lain” untuk memberantas korupsi yang ternyata efektif. Yaitu menempatkan orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya pada tempat yang rawan terjadinya korupsi. Disebut sebagai “cara lain”, karena sebelumnya telah terdapat cara-cara konvensional sebagaimana selama ini dilakukan. Mereka yang disebut sebagai kelompok pondamentalis, di antara ciri-cirinya adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman agama secara mendalam, mencintai ibadah, kitab suci, dan tidak mau menerima sesuatu manakala dipandang olehnya tidak halal. Mereka selalu menampakkan diri sebagai orang yang selalu memegang ajaran agamanya. Menurut pimpinan dinas perpajakan dimaksud, bahwa cara menempatkan staf seperti itu adalah benar, terbukti selama itu diakui tidak pernah terjadi penyimpangan berupa korupsi yang tidak boleh ditoleransi.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan dinas perpajakan sebagaimana dikemukakan di muka, kiranya sesuai dengan kepribadian ideal bangsa ini, yaitu ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ia menyandang keimanan. Para koruptor, diyakini bahwa sebenarnya tatkala sedang melakukan tindakan menyimpang itu, adalah sedang tidak beriman. Oleh karena itu menunjuk orang yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, untuk menempati posisi yang rawan terjadinya korupsi, adalah merupakan strategi atau kebijakan yang tepat. *Wallahu a'lam*.